

## **ADB Melakukan Konsultasi di Indonesia Untuk Memperbarui Kebijakan Perlindungan**

**Manila, Filipina (11 Februari 2008)** - Asian Development Bank akan mengadakan lokakarya konsultasi dengan pejabat pemerintah dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia untuk mendapatkan masukan mereka mengenai rencana pembaruan kebijakannya yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat adat dan pemindahan penduduk bukan dengan suka rela yang dikenal dengan sebutan Kebijakan Perlindungan. Lokakarya ini merupakan bagian dari serangkaian lokakarya serupa yang dilakukan di seluruh Asia.

Kebijakan Perlindungan ADB mensyaratkan agar proyek-proyek yang didanai ADB menghindari munculnya kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan, dan apabila hal tersebut tidak mungkin dihindari maka proyek-proyek tersebut harus meminimalkan, mengurangi dan atau memberikan ganti rugi atas dampak merugikan yang ditimbulkan.

ADB melakukan pembaruan Kebijakan Perlindungan ini untuk menyatukan tiga kebijakan Lingkungan, Masyarakat Adat dan Pemindahan Penduduk Bukan Dengan Sukarela yang ada selama ini menjadi satu kebijakan agar bisa dilakukan pendekatan yang bersifat menyeluruh untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak, masyarakat adat dan lingkungan terlindungi.

Lokakarya konsultasi ini diadakan untuk memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan tinjauan dan memberikan komentar terhadap hal-hal penting yang dilakukan dalam pembaruan kebijakan termasuk upaya-upaya untuk menyelaraskan syarat-syarat kebijakan ADB dengan syarat-syarat yang diterapkan oleh lembaga keuangan multilateral lainnya.

"Tujuan dari pembaruan Kebijakan Perlindungan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dari Kebijakan Perlindungan ADB dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan klien yang berubah dan peluang-peluang bisnis yang baru," demikian dikatakan oleh Nessim Ahmad, Direktur Divisi Lingkungan dan Perlindungan Sosial ADB.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam lokakarya di negara-negara lain menyatakan kekawatiran mereka bahwa pembaruan kebijakan ini justru akan membuat Kebijakan Perlindungan yang sudah ketat menjadi kurang efektif.

---

### **Media Inquiries**

Daniel Cooney  
Tel: 63 920 938 6487  
E-mail: [dcooney@adb.org](mailto:dcooney@adb.org)  
Ayun Sundari  
Tel: 62 21 812 961 27 27  
Email: [asundari@adb.org](mailto:asundari@adb.org)

### **Electronic versions of ADB news releases**

ADB Online Media Center: [media.adb.org](http://media.adb.org)  
ADB web site: [www.adb.org](http://www.adb.org)

"ADB tidak memiliki niat untuk melemahkan tujuan dan prinsip-prinsip di dalam kebijakan yang ada selama ini bahkan justru beberapa aspek diperkuat seperti misalnya dalam hal mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat, proses konsultasi yang lebih baik dan perhatian lebih pada saat pelaksanaan proyek." Demikian dikatakan oleh Nessim Ahmad. "Lokakarya konsultasi yang diselenggarakan sejauh ini hidup, bermanfaat dan konstruktif. Kami mendorong seluruh kelompok untuk aktif dalam proses konsultasi ini supaya suara mereka bisa didengar."

Lokakarya konsultasi di Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari dengan melibatkan wakil-wakil dari pemerintah, organisasi-organisasi non pemerintah, akademisi dan sektor swasta dari seluruh Indonesia. Wakil-wakil dari lembaga keuangan multilateral dan lembaga-lembaga pembangunan lainnya juga diharapkan akan ikut berpartisipasi.

Draft konsep kebijakan yang akan dikonsultasikan sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan telah dimuat di situs ADB sejak bulan Oktober lalu dan akan terus dimuat hingga bulan April 2008 untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk memberikan masukan. Setelah proses konsultasi, ADB akan menyusun draft kebijakan dan memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan masukan tambahan. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi website ADB di <http://www.adb.org/Safeguard/about.asp>.

ADB yang berkedudukan di Manila bertekad mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memihak kepada kaum miskin, pembangunan sosial dan tata kelola yang baik. ADB didirikan pada tahun 1966 dan dimiliki oleh 67 negara termasuk 48 negara di kawasan Asia. Pada tahun 2007, ADB menyetujui pinjaman senilai \$10,1 miliar dan proyek hibah senilai \$673 juta serta bantuan teknis senilai \$243 juta.